

LEGITIMASI DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Oleh:

Roihanah¹⁾, Farid Setiawan²⁾, Erwan Setianto³⁾, Istinganah⁴⁾

^{1,2,3,4}Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan

¹E-mail: roihanah1900031085@webmail.uad.ac.id

²E-mail: farid.setiawan@pai.uad.ac.id

³E-mail: erwan1900031086@webmail.uad.ac.id

⁴E-mail: istinganah2000031224@webmail.uad.ac.id

Abstrak

Kebijakan timbul beriringan dengan adanya pertumbuhan penduduk dan permunculan masalah kebutuhan hidup masyarakat. Konsepsi sebuah legitimasi ditandai dengan sebuah perspektif individu terhadap sebuah kekuatan dan kekuasaan. Legitimasi merupakan sebuah kegiatan yang mengesahkan dan merumuskan dengan sebuah pelaksanaan kebijakan. Sebelum sebuah kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan, terlebih dahulu harus diadakan aktivitas legitimasi. Kebijakan perlu dikomunikasikan kepada rakyat agar rakyat dapat menerima dan mendukung kebijakan tersebut. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan sebuah berlakunya kebijakan pendidikan, maka kebijakan pendidikan tersebut dikatakan terlegitimasi atau berlaku setelah mendapatkan pengakuan dan persetujuan oleh masyarakat setempat dan dari dinas yang terkait.

KataKunci: legitimasi; komunikasi; kebijakan

1. PENDAHULUAN

Kebijakan sering diartikan dengan aturan, kebijakan, program, undang-undang, kesepakatan, regulasi, keputusan strategis, dan regulasi. Kebijakan adalah peraturan tertulis yang merupakan keputusan resmi. Kebijakan dapat mengatur perilaku seseorang dengan tujuan untuk menciptakan tatanan nilai baru dalam masyarakat tempat mereka bertindak. Kebijakan, tidak seperti peraturan dan undang-undang, pada dasarnya bersifat proaktif dan pemecahan masalah. Politik mengatur apa yang boleh bersifat interpretif dan adaptif. Analisis politik sebagai tindakan yang digunakan untuk merumuskan suatu kebijakan, baik itu kebijakan baru maupun kebijakan hasil dari kebijakan yang sudah ada.

Kebijakan timbul beriringan dengan adanya pertumbuhan penduduk dan permunculan masalah kebutuhan hidup masyarakat. Perjalanan hidup manusia yang dimulai dengan keberadaan Adam Hawa kini melebihi 2 miliar. Ini bisa menjadi sejarah panjang dalam menghasilkan berbagai prestasi budaya, salah satu prinsip yang ada. Awalnya, pendekatan ini lahir dari kebutuhan untuk melatih pendekatan agar masyarakat dapat terus menyampaikan nilai-nilai sosial di masa depan.

Setelah kebijakan dibuat maka perlu dilegitimasi, karena hasil dari kebijakan tersebut perlu didukung oleh masyarakat setempat. Pengakuan dari masyarakat ini pada umumnya dilakukan melalui badan-badan perwakilan rakyat. Pengakuan masyarakat ini penting karena ketika kebijakan diimplementasikan tanpa persetujuan masyarakat, ada ketakutan akan penolakan oleh masyarakat lokal. Karena bagaimanapun juga, pelaksanaan kebijakan pendidikan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap kegiatannya. Secara umum,

pemerintah atau legislatif memiliki kekuasaan untuk menjalankan legitimasi.

Namun karena hubungan antara negara dan rakyat sebagai sumber legitimasi terpenting, derajat legitimasi pemerintah sangat bergantung pada ketersediaan dukungan dari pemerintah, sehingga pengawasan memasuki proses legitimasi. Pemerintah dan apa yang mereka inginkan dari rakyat.

2.METODE PENELITIAN

Kajian yang dipakai dalam metode penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan kepustakaan atau Library Research, metode ini merupakan kegiatan mengumpulkan sumber-sumber Pustaka dan menyatukannya menjadi satu bagian. Langkah kegiatan ini yaitu membaca sumber, menghayati serta memahami pembahasan lalu mencatat hasil tersebut.

Proses pengumpulan sumber penelitian ini biasanya menggunakan berbagai macam literatur, buku, artikel, jurnal, dokumen pribadi, majalah, dan referensi lainnya. Tahap pertama melakukan penelitian ini yaitu memilih tema yang sesuai dengan pembahasan. Kemudian mengeksplor informasi agar dapat focus pada tujuan penelitian. Lalu mengumpulkan berbagai macam sumber data dan membaca secara mendalam dan menggali materi secara aktif dan kritis. Tahap selanjutnya yaitu mencatat, tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap yang paling penting dalam penyusunan artikel. Kemudian mengolah serta menyusun materi yang telah didapatkan. Tahap yang terakhir yaitu membuat kesimpulan pada akhir artikel.

Penelitian dalam artikel yaitu berupa berjenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitiannya yang tidak menggunakan perhitungan atau sebuah hasil yang didapatkan tidak

menggunakan cara-cara berupa statistic, pada intinya tidak menggunakan cara-cara seperti yang didapatkan dalam metode penelitian kuantitatif yang hasil dari penelitiannya berupa perhitungan menggunakan angka-angka (Moha and sudrajat 2019). Dapat ditarik secara umum pembahasan mengenai penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dalam pelaksanaannya melihat berdasarkan sebuah fakta, fenomena, aktivitas sosial dan lain sebagainya yang terjadi dalam suatu objek penelitian. Yang menjadi salah satu alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif adalah agar penulis dapat langsung bisa meneliti sebuah fakta, fenomena dan aktivitas sosial dalam lapangan tentang legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Legitimasi mengacu pada prinsip menunjukkan penerimaan publik terhadap kebencian terhadap pemimpin, pemerintah, dan pejabat, berdasarkan persetujuan pemimpin dan administrator yang berkuasa, sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditegakkan oleh publik. jauh, termasuk nilai-nilai politik atau moral. Pada umumnya legitimasi diserahkan kepada yang berkuasa dengan berbagai cara untuk menyampaikannya kepada masyarakat yang berbeda penyerahan tersebut juga dapat dilihat dari berbagai perspektif masyarakat, yang kebanyakan biasanya bersifat keagamaan atau non-keagamaan. seperti beberapa contoh penyerahan legitimasi dan penyerahan kepada yang berkuasa, yaitu lahirnya kerajaan dan penobatan monarki, pemilihan dan sumpah yang demokratis, dll. Legitimasi juga merupakan bentuk desain yang menciptakan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. (Indriani 2011)

Legitimasi dapat diartikan dalam arti luas atau sempit, dengan legitimasi dalam arti luas adalah dukungan masyarakat dengan institusi politik, sedangkan legitimasi dalam arti sempit adalah dukungan publik untuk memberdayakan pemerintah. Legitimasi antara kekuatan normatif dan kualitas pribadi sangat terkait. Legitimasi kebijakan pendidikan dapat digolongkan sebagai kebijakan publik di bidang pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara dan bernegara di bidang pendidikan.

Legitimasi kebijakan pendidikan pada hakikatnya terdiri dari bentuk pengambilan keputusan dengan substansi sebagai berikut: tujuan, prinsip, dan aturan. Format yang digunakan dalam legitimasi kebijakan pendidikan biasanya dituliskan dan disahkan untuk sebagai pedoman oleh pemimpin pemegang kekuasaan, staf dan personal organisasi yang terkait serta interaksinya dengan lingkungan eksternal yang masih berkatan.

Konsepsi sebuah legitimasi ditandai dengan sebuah perspektif individu terhadap sebuah kekuatan dan kekuasaan. Dengan begitu bisa diartikan bahwa

apakah daerah setempat mengakui dan memandang adanya hak perintis yang diharapkan dapat membantu serta melaksanakan apa yang telah di setujui dan terikat daerah tersebut ataupun tidak. Adapun jika dalam hal tersebut daerah setemoat mengakui dan memandang adanya hak perintis yang diharapkan dapat membantu serta melaksanakan apa yang menjadi pengikat daerah setempat, maka pihak yang berwenang berhak mengatur sebagai otentik atau melegitimasi. Dengan ini artinya, keaslian dating dari sebuah pengakuan masyarakat atas dasar keistimewaan para pionir, agar bisa menetapkan dan melakukan pemilihan politik. Secara bahasa etimologi legitimasi bersumber dari bahasa latin, Lex yang mengandung arti sebuah hukum.(MUHLIADI 2013)

Sebuah teori legitimasi sangat penting bagi sebuah organisasi karena setiap prinsip legitimasi dilandasi atas norma yang mengandung nilai dari peraturan sosial, menjadi sebuah organisasi merasakan akan adanya eksistensi dan aktivitas yang telah terlegitimasi. Diindikasikan oleh Silalahi, dikutip oleh Ali Imron,(Farid Setiawan 2007) kata legitimasi berasal dari kata legitimacy yang memiliki arti memberi sebuah kekuasaan atas posisi yang premis, aktivitas sebuah rancangan politik, termasuk siklus penataan, rekomendasi agar bisa menangani sebuah isu dan kasus yang muncul dari ranah politik.

Legitimasi juga berasal dari sebuah kata keaslian yang menunjukkan peredaran tertentu di mana program sebuah pemerintahan disetujui dan dilegitimasi, sehingga cenderung terlihat bahwasanya legitimasi mengandung dua implikasi, yaitu pertama, yang mengatur sebuah posisi untuk memberikan arahan untuk sebuah tindakan, dan seorang yang bertanggung jawab atas program yang diusulkannya. Legitimasi merupakan sebuah kegiatan yang mengesahkan dan merumuskan dengan sebuah pelaksanaan kebijakan. Sebelum sebuah kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan, terlebih dahulu harus diadakan aktivitas legitimasi.

Sebuah kebijakan yang perlu dilegitimasi, karena hasil dari kebijakan tersebut perlu didukung oleh masyarakat setempat. Pengakuan dari masyarakat ini pada umumnya dilakukan melalui badan-badan perwakilan rakyat. Pengakuan masyarakat ini penting karena ketika kebijakan diimplementasikan tanpa persetujuan masyarakat, ada ketakutan akan penolakan oleh masyarakat lokal. Karena bagaimanapun juga, pelaksanaan kebijakan pendidikan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap kegiatannya.

Dengan adanya kewenangan inilah, mereka yang memiliki kewenangan harus bisa melaksanakan program juga akan diminta atas pertanggung jawaban atas hasil pelaksanaan kegiatan kewenangannya. Dari uraian yang telah di jelaskan oleh para pakar ahli di atas bisa diambil kesimpulan bahwasanya legitimasi adalah sebuah pemberian wewenang terhadap Lembaga untuk membuat dan melaksanakan

sebuah keputusan sebagai bentuk pengesahan atas dasar persetujuan masyarakat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan sebuah berlakunya kebijakan pendidikan, maka kebijakan pendidikan tersebut dikatakan terlegitimasi atau berlakusetelah mendapatkan [engakuan dan persetujuan oleh masyarakat setempat dan dari dinas yang terkait.

B. Proses Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan yang telah dibuat atau diformulasikan, harus disahkan atau di legitimasi terlebih dahulu sebelum diterapkan kepada masyarakat. Legitimasi ini sangat penting karena dapat membawa dampak yang positif maupun negatif. Tahapan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni:

1. Simbolis yakni dengan mengedepankan kepercayaan pada masyarakat secara simbolik, yaitu berupa simbol-simbol seperti penghormatan nilai-nilai budaya juga tradisi dan kepribadian yang baik. Contoh kegiatannya seperti pementasan wayang dan upacara kenegaraan.
2. Prosedural yakni menjanjikan kemakmuran materi kepada rakyat. Contohnya antara lain menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, menjamin ketersediaan pangan yang dibutuhkan masyarakat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menjanjikan fasilitas produksi pertanian, telekomunikasi dan transportasi, serta modal yang cukup.
3. Materil yakni untuk menentukan wakil-wakil rakyat, presiden perdana menteri, dan yang lainnya dengan mengadakan pemilihan umum.

Menurut Andrain, pengelompokan legitimasi berdasarkan prinsip dukungan dan pengakuan dari masyarakat kepada pemerintah terbagi menjadi lima tipe yakni:

1. Legitimasi tradisional, yakni kesadaran masyarakat untuk memberi dukungan dan pengakuan terhadap pemimpin pemerintahan. Karena para pemimpin ini adalah keturunan dari para pemimpin "Darah Biru" yang dipercaya bertanggung jawab dalam menjalankan amanah.
2. Legitimasi ideologi, yakni masyarakat menaruh dukungan kepada pemimpin pemerintahan. Karena para pemimpin ini dianggap sebagai pelaksana dan penafsir ideologis. Artinya tidak hanya ideologi doktrinal seperti komunisme, tetapi juga ideologi praktis seperti liberalisme dan ideologi Pancasila.
3. Legitimasi kualitas pribadi, yaitu kesadaran masyarakat dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin memiliki kualitas pribadi yang karismatik dan sikap baik hati serta prestasi yang membanggakan di bidang tertentu.
4. Legitimasi prosedural, yakni pemimpin memiliki kewenangan menurut tata cara yang ditetapkan undang-undang, sehingga masyarakat memberikan persetujuan dan dukungan kepada pemerintah.

5. Legitimasi instrumental, yaitu masyarakat memberikan kesadaran dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut menjamin atau menjanjikan kesejahteraan materi (instrumental) kepada masyarakat.

Kebijakan yang telah dirumuskan, ada kalanya masih dapat dimintakan pendapat secara langsung kepada rakyat, kemudian rakyat tersebut diminta untuk memberikan dukungan. Akan tetapi ada juga, kebijakan tersebut dimintakan dukungan oleh aktor kebijakan kepada tokoh-tokoh kunci atau non formal yang ada di masyarakat. Dengan tujuan agar tokoh non formal atau kunci tersebut yang kemudian akan mengumpulkan dukungan kepada massa atau rakyat. Tokoh-tokoh kunci atau informal ini ada di sektor profesi, agama, seni, dan budaya, bisnis, pertanian, bahkan bisnis dan jasa. Tokoh informal ini tidak menyanggah status pemerintahan, tetapi umumnya memiliki massa dan menaruh kepercayaan besar kepada mereka. Pada beberapa kasus, tokoh-tokoh kunci yang diusulkan diterima dengan baik.

Kebijakan yang telah dibuat dan disahkan secara resmi bukanlah hal yang final. Namun, hal tersebut masih dapat direvisi, diperbaiki, dan ditingkatkan. Dan pengesahan ini dilakukan antara lain untuk melengkapinya agar tidak menemui kendala dalam pelaksanaannya. Dengan legitimasi ini, orang akan menanggapi keinginan dan harapan mereka dan akan mengungkapkan dukungan mereka. Sementara kegiatan legitimasi membutuhkan dukungan dan kebijakan yang sempurna, titik legitimasi adalah pengembangan kebijakan yang sah dan final. (Dedurro 2012)

C. Problema Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan, terdapat banyak problema. Pertama yakni adanya kekuatan dari mantan perumus kebijakan yang sudah tidak menjadi perumus lagi. Hal itu membuat adanya kehendak bahwa mantan perumus kebijakan tersebut beranggapan bahwa kebijakan yang telah ia rumuskan dahulu, masih bisa dipertahankan sampai kini.

Problema yang kedua yakni adanya penentangan dari kalangan konservatif terhadap kebijakan yang belum lama dirumuskan. Di sinilah kebijakan yang dibuat berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang dianggap tradisional. Hal-hal tradisional umumnya sulit diubah, dan keinginan untuk mengubahnya membutuhkan waktu lama dalam masyarakat konservatif.

Ketiga yakni sebagai akibat perlawanan dari golongan konservatif dan mantan perumus kebijakan yang bukan lagi perumus menyapu pendukungnya. Pengikutnya ini juga umumnya cenderung akan mengikuti gerakan dan langkah pemimpinnya. Hal ini akan menghambat dan mengganggu proses legalisasi atau setidaknya akan memakan waktu yang lebih lama.

Keempat yakni adanya kekuatan dari kelompok yang memiliki persepsi, visi, dan

kepentingan yang tidak sama dengan para perumus dan legitimator kebijakan. Kelompok perlawanan seperti ini pada umumnya tidak mudah untuk disingkirkan apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, para legitimator berupaya merangkulnya untuk mendukung kebijakan yang telah dirumuskan.

Legitimasi juga dapat mengalami krisis jika seseorang dan lembaga legitimasi tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengelola negara. Dalam hal ini, setelah legitimasi, membutuhkan kapasitas dan kapabilitas untuk menerapkan program-program yang secara langsung menyentuh rakyat. Rakyat sebagai pemegang legitimasi tertinggi, kesejahteraan dan keamanannya, menjadi kriteria utama dalam menilai legitimasi kemampuan suatu bangsa. Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang sah tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan.

Pada masa transisi, umumnya dapat terjadi krisis legitimasi. Selain itu, terjadi pergeseran dari satu jenjang kualitas pembangunan ke jenjang kualitas pembangunan masyarakat lainnya. Masyarakat seperti ini lebih mengarah untuk mempertanyakan otoritas yang diyakini tidak mencerminkan keinginan hidup dalam masyarakat. (Dedurro 2012)

D. Pengertian Komunikasi

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling membutuhkan. Sebagai manusia sosial, tentunya kita tidak bisa tanpa interaksi dan komunikasi. Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang memerlukan partisipasi manusia dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dan mencapainya. Dalam kegiatan ini, manusia memiliki kepentingan dan tujuan individu yang bertentangan dengan kepentingan bersama masyarakat. (Ety Nur Inah 2013)

Menurut Onong yang dikutip oleh Irene, pengertian komunikasi dalam bahasa Inggris disebut communication, yang berasal dari bahasa latin communicatio, dari kata communis yang berarti sama, dan same dalam pengertian ini berarti sama. (Dr. Irene Silviani 2020) Oleh karena itu, definisi komunikasi yaitu adanya kesamaan makna mengenai apa yang menjadi bahan pembicaraan. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses pembuatan sesuatu yang menjadi milik seseorang sejak semula, orang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih. Berbagai konflik yang muncul di Indonesia bermula dari kurangnya kapasitas untuk mengembangkan konflik yang efektif, yang merupakan salah satu definisi komunikasi Harold D. Lasswell. (Dr. Irene Silviani 2020)

Dalam suatu pertukaran, tidak hanya saling pengertian dan pengertian, tetapi juga tujuan pertukaran, ada empat tujuan pertukaran, yaitu: Pertama, untuk mengubah sikap pemberian informasi kepada publik, tujuannya agar masyarakat mengubah sikapnya. Kedua, perubahan pendapat menyampaikan

suatu informasi kepada masyarakat diharapkan bisa menerima pendapat dan berubah pendapat terhadap apa yang mereka terima dari informasi yang telah disampaikan. Ketiga, perubahan perilaku menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat bisa bertujuan agar masyarakat akan berubah perilakunya. *Keempat*, perubahan sosial memberikan berbagai pesan kepada publik yang tujuan akhirnya adalah mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung tujuan pesan tersebut. Serta mampu menjaga hubungan bawahan yang baik dalam menjalankan organisasi.

Fungsi komunikasi yaitu, agar manusia dapat mengontrol lingkungan sekitarnya, beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal, serta melakukan tranformasi warisan sosial kepada generasi yang berikutnya. Dengan demikian, melalui komunikasi yang baik hubungan antara manusia diharapkan dapat dipelihara dengan baik pula. Dengan adanya komunikasi manusia yang hidup sebagai makhluk sosial bisa menambah dan memperbanyak sahabat, rekan, rezeki, serta mampu menjaga hubungan bawahan yang baik dalam menjalankan organisasi. Efek komunikasi selalu memiliki efek pada satu atau lebih orang yang terlibat dalam tindakan komunikasi. Dalam perilaku komunikatif, ada beberapa konsekuensi, dan efek komunikasi dapat terjadi secara kognitif, emosional, dan perilaku. (Dr. Dra. Poppy Ruliana 2019)

E. Pengertian komunikasi kebijakan Pendidikan

Komunikasi dalam kebijakan pendidikan merupakan pengenalan sesuai rencana-rencana kebijakan pendidikan yang telah dilegitimasi. Sehingga komunikatornya ialah para pemeran yang sesuai rencana-rencana kebijakan pendidikan, sedangkan komunikannya ialah pemeran pembuat kebijakan pendidikan secara bersama-sama rancangan dan publik pada umumnya. Mengenai materi yang dikomunikasikan ialah yang berkaitan dengan rencana-rencana kebijakan tersebut awalnya dari isinya, tercapai beserta penjelasannya. Sebagai itu pemeran kebijakan pendidikan berhubungan dengan perangkatnya menyebarkan melalui rumusan-rumusan kebijakan yang terkandung tersebut kepada publik. Komunikasi dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tidak terkecuali dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan karena itu memiliki dua alasan yaitu supaya khalayak memahami lebih dalam serta menghindari kesalahan pemahaman.

F. Model komunikasi kebijakan Pendidikan

Model komunikasi kebijakan pendidikan dibagi menjadi tiga yaitu; komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, dan komunikasi multi atau transaksional. Komunikasi bisa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung bisa secara verbal, non verbal atau dengan secara keduanya. Saat di masyarakat, komunikasi dapat dilakukan dengan bicara, menulis, gerak isyarat informal, gerak isyarat yang sistematis impuls elektrik dan sebagainya. Pada dasarnya apapun model komunikasi dan cara

penyampaiannya, komunikasi memiliki tiga komponen penting yaitu: pengirim, pesan dan penerima.

Pengirim pesan sering disebut komunikator serta penerima pesan disebut komunikan. Pengirim atau komunikator, dalam hal ini yang dimaksud komunikator ialah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Pihak disini bisa seorang diri sendiri, kelompok, organisasi, atau bahkan suatu negara. (Elih Yuliah 2020)Pesan yaitu apa yang dikomunikasikan oleh komunikator ke komunikan. Pesan bisa berupa simbol verbal maupun non verbal yang bertindak sebagai wakil dalam hal perasaan, nilai, gagasan atau maksud dari komunikator tersebut. Pesan yang berupa simbol verbal yaitu kata-kata dalam bahasa sedangkan pesan nonverbal yaitu dapat berupa tindakan atau isyarat anggota tubuh juga melalui musik, lukisan dan sebagainya. Penerima komunikan, yaitu orang yang menerima pesan dari komunikator. Pesan baik dalam verbal maupun nonverbal yang memperoleh komunikan hendak diterjemahkan dan ditafsirkan menjadi ide yang bisa dipahami. Akibat setelah penafsiran pesan tersebut bisa saja komunikan merasa akan terhibur, bertambah pengetahuannya, adanya perubahan tingkah laku dan sebagainya.

G. Problematika komunikasi kebijakan Pendidikan

Terdapat 3 sumber yang menyebabkan problema dalam komunikasi kebijakan yaitu:

a. Bersumber melalui komunikator

Problema dari bersumber melalui komunikator kebijakan pendidikan yaitu:

- 1) Komunikator tidak ahli ketika memberikan pesan-pesan kebijakan akhirnya yang seharusnya pesan-pesan tersebut disampaikan secara jelas menjadi tidak jelas akibat tidak tersampaikan dengan jelas.
- 2) Perbedaan sumber acuan antara komunikator dengan komunikan. Keadaan ini bisa menyebabkan tidak tepatnya komunikator dalam menyampaikan kebijakan pendidikan.
- 3) Kurangnya integritas komunikator dimata komunikasi. Kredibilitas komunikator mencakup banyak hal, mulai dari tingkat ketokohnya di masyarakat, karakternya serta kemampuannya.

b. Bersumber dari pesan itu sendiri

Problema yang bersumber dari pesan itu sendiri yaitu:

- 1) Rumusan kebijakan yang kurang jelas. Rumusan yang tidak jelas mengakibatkan penerima pesan tersebut juga tidak jelas dalam menerima pesan.
- 2) Rumusan kebijakan yang asing. Rumusan kebijakan yang asing hendak memberi peluang penolakan dari masyarakat. Sumber acuan yang telah dimiliki oleh masyarakat mengakibatkan terjadinya penolakan terhadap hal-hal yang baru.
- 3) Kebijakan yang terlalu ideal dan kurang realistik. Hal ini akan mengakibatkan komunikan tidak peduli terhadap pesannya karena hanya dianggap omong kosong yang tidak mungkin dapat dilakukan.

c. Bersumber dari komunikannya

Problema yang bersumber dari komunikan yaitu:

- 1) Komunikan yang heterogen. Maksud dari heterogenitas ini ialah bisa jadi dalam hal tersebut tingkatan pendidikan, perbedaan etnik, kepercayaan dan agamanya. Heterogenitas ini mengakibatkan kesulitan saat mencari bahasa yang sesuai untuk mereka karena apabila mereka menggunakan bahasa yang tinggi akan sulit dipahami oleh rakyat kebanyakan namun apabila menggunakan bahasa yang rendah akan dianggap tidak berbobot oleh mereka yang tingkatannya tinggi.
- 2) Adanya kesalahan dalam penerimaan pesan oleh komunikan yang mengakibatkan kelirunya pemahaman seseorang mengenai kebijakan.

4.KESIMPULAN

Kebijakan yang telah dibentuk sangat penting untuk disahkan atau di legitimasi. Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan hak moral masyarakat untuk mengatur, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Maklum, legitimasi adalah hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, dan hubungan ini lebih ditentukan oleh yang dipimpin, karena penerimaan dan pengakuan otoritas hanya datang dari yang diperintah. Kebijakan tersebut perlu dukungan dari masyarakat atau rakyat. Apabila kebijakan diterapkan tanpa persetujuan masyarakat akan ada ketakutan terkait penolakan atau tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Padahal, kebijakan pendidikan melibatkan seluruh masyarakat atau rakyat dalam kegiatan tersebut.

5.REFERENSI

- Dedurro. 2012. "LEGITIMASI KEIJAKAN PENDIDIKAN DEMA-ROIS." 1-3.
- Dr. Dra. Poppy Ruliana, M. S. 2019. *Teori Komunikasi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Dr. Irene Silviani, MSP. 2020. *KOMUNIKASI ORGANISASI*. edited by M. Dr. Irene Silviani. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka.
- Elih Yuliah. 2020. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir* 30. N:4.
- Ety Nur Inah. 2013. "PERANAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN." *Jurnal Al-Ta'dib* 6(177):176-88. doi: 10.1190/segam2013-0137.1.
- Farid Setiawan, Dkk. 2007. "Legitimasi Dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan." 13(1):13. doi: 10.47435/jpdk.v6i2.625.
- Indriani, Rakhmawati. 2011. "Legitimasi Kebijakan Pendidikan." *Wordpress.Com* 4. Retrieved (wordpress.com/pendidikan/legitimasi-kebijakan-pendidikan/).
- Moha, Iqbal, and Dadang sudrajat. 2019. "Resume Ragam Penelitian Kualitatif."
- MUHLIADI. 2013."KEKUASAAN DAN LEGITIMASI POLITIK MENURUT IBN

KHALDUN Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial Jurusan Pemikiran Politik Islam Pada Fakultas Ushuluddin , Filsafat Dan Politik UIN Alauddin Makassar Oleh.”